

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT MENGHADAPI LINGKUNGAN GLOBAL

Syafaruddin Alwi

Abstract

The empowerment of the mass economy has been of considerable interests among government, industrialists, and society lately. This issue is very significant to be emphasized here. Because participation of the mass is a significant element in the development process. There are several programs arranged, including the partnership program. The problem is how the shape of the partnership should be.

Practically, the mass economy could not be empowered by the partnership program yet. Unfortunately, the partnership seems to be more politic rather than economic, whereas idealistically, the partnership should be able to create professionalism and both effective and responsive business network in the very dynamic environment. The partnership is focused on the three basic concept i.e. institutional, take and give, and also populist. As noted in the basic concept of the partnership, the strong and weak economic power have an equal take and give position. Therefore the partnership should be beneficial to each other.

Berdiskusi tentang ekonomi kerakyatan, harus disamakan persepsi terlebih dahulu apa itu ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menurut Sarbini (Syahrir, 1989), bukanlah suatu ideologi atau gagasan baru, tetapi sekedar percobaan rumusan interpretasi dan cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Para pendiri Republik telah mempelopori kita dengan perumusan dasar yang jelas tetapi perumusan dasar ini memerlukan interpretasi dan penerjemahan dalam suatu strategi dan program pembangunannya yang lebih berfungsi dan lebih menjamin arahnya pada cita-cita tersebut. Pembangunan ekonomi yang berorientasi kerakyatan dalam pandangan Sarbini merupakan pembangunan yang menekankan pada nasib bersama dan perbaikan nasib rakyat

banyak yang secara ekonomi kurang beruntung.

Ekonomi kerakyatan bagi Emil Salim (Swasono, 1985), yang dikenal sebagai ekonomi Pancasila, adalah pembangunan ekonomi yang meletakkan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi yang terdiri dari berbagai sub-sistem masyarakat yaitu, petani, nelayan, buruh, masyarakat penawar jasa, dan sebagainya. Masyarakat berbagai sub-sistem tersebut, sebagian terbesar berada di perdesaan yang tidak tergolong sebagai kaum menengah. Ekonomi rakyat berdasarkan referensi ini dapat diartikan sebagai ekonomi masyarakat bawah yang selama ini diidentifikasi sebagai lemah dalam permodalan, lemah dalam produksi, lemah dalam akses pembangunan ekonomi adalah

manusia. Dengan demikian manusia adalah subyek pembangunan yang juga adalah obyek (penerima hasil). Sebagai subyek, dalam strata sosial apapun, mereka harus terlibat dalam proses pembangunan.

Pembangunan ekonomi kita selama ini sering dikritik sebagai kurang berpihak kepada perekonomian rakyat kecil yang bersifat *fragmented economy* dan cenderung menciptakan perekonomian yang oligopolistik (*concentrated economy*), nepotisme dan sebagainya. Masalah ini telah disorot oleh Bank Dunia dalam laporan tahun 1995 menjelang sidang *Consultative Group on Indonesia* (CGI). Pada kenyataannya memang banyak anak pejabat yang berbisnis dan umumnya mereka berhasil membangun kekuatan bisnis yang luar biasa sehingga menimbulkan tanda tanya apakah mereka itu besar karena kemampuan atau besar karena fasilitas. Adakah ini pertanda kelemahan lingkungan politik dan strategi yang salah dalam pembangunan ekonomi Indonesia sehingga pemberdayaan rakyat dalam proses pembangunan tidak optimal dan akhirnya menciptakan ketidakadilan?

Proyeksi sosial ekonomi Indonesia (versi Depnaker), jumlah penduduk pada tahun 2000 akan mencapai 201,60 juta jiwa dan sampai menjelang akhir PJP II (tahun 2018) akan mencapai 254,77 juta jiwa. pendapatan per kapita pada tahun itu diharapkan menjadi US \$ 2.631. Sementara itu, jumlah penganggur yang bekerja kurang dari 35 jam, pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 37,02 juta jiwa (angka perkiraan Depnaker). Melihat angka ini pembahasan mengenai bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi kekuatan mandiri di bidang ekonomi sehingga tidak hanya menjadi pencari kerja menjadi penting. Tentu saja jawaban terhadap persoalan itu tidak mudah, karena akan menyangkut

perilaku sosial masyarakat, kultur, sumber-sumber daya ekonomi yang dapat digunakan, iklim politik yang tercipta dan strategi pembangunan yang dijalani.

PEMBERDAYAAN DAN MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA

Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak hanya menyangkut peran pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi politik yang kondusif bagi rakyat untuk berusaha, tetapi juga menyangkut kualitas sumber-daya manusia (SDM) baik dalam dimensi sebagai tenaga kerja profesional maupun dalam dimensi kemandirian berusaha untuk menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

Perkembangan tenaga kerja Indonesia pada tahun 1994 mencapai 83,7 juta dan kesempatan kerja yang tersedia 87%. Jika dilihat dari proyeksi sampai tahun 2000 dan 2010 mencapai 97,36 juta orang dan 125,71 juta orang. Kesempatan kerja yang tersedia pada tahun 2000 diperkirakan 92% dan tahun 2010 diperkirakan 93% (Pusat Informasi Kompas). Berdasarkan data BKKBN, pertumbuhan penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas antara tahun 1995-2020 diperkirakan sebesar 50,65%. Daya serap yang terbesar masih tetap sektor pertanian yaitu 49,5% (tahun 1993) dan diperkirakan 43,9% tahun 1998 (Depnaker). Pertumbuhan tenaga kerja asing di Indonesia tahun 1994-1995 yang terbesar adalah Korea Selatan (110,65%), kemudian India (79,72%), Hongkong (59,04%), Taiwan (52,74%) dan Jepang (46,23%). Pertumbuhan ini erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut di Indonesia.

Dilihat dari keterkaitan ekonomi dengan perekonomian global, kemampuan SDM untuk menunjang kekuatan ekonomi domestik menurut *World Competitiveness Report* 1996, dari 46 negara di Asia

Indonesia menduduki rangking ke 44 (tahun 1995) dan rangking ke 45 (tahun 1996). Sedangkan Filipina yang kondisi perekonomiannya tidak lebih baik dari Indonesia menduduki rangking ke 40 (1995) dan rangking 35 (1996). Ini berarti ada masalah dengan kualitas SDM Indonesia, paling tidak dapat diartikan kualitasnya belum cukup untuk menciptakan keberdayaan yang mampu mengisi peluang ekonomi yang timbul.

Beranjak dari kondisi seperti itu, penyediaan SDM menjelang abad ke 21 mengalami tantangan yang cukup berat, karena persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut kesempatan kerja tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas tenaga kerja. Persoalan ini bukan saja menjadi tanggung jawab Depnaker, tetapi juga departemen lain terutama Depdikbud. Dilihat dari strategi pengembangan SDM nasional, kita baru berada pada tahap *administration stage*, yaitu suatu tahap dimana peran pemerintah sangat besar dalam mengelola SDM. sebagai contoh, penetapan UMR pun harus melalui campur tangan pemerintah. Kita harus menuju ke *entrepreneurial stage* dimana tingkat upah misalnya ditentukan oleh kekuatan *supply* dan *demand*. Fase ini akan tercapai kalau kualitas SDM kita sudah *standardized*, artinya angkatan kerja yang sudah bersifat *skilled worker*.

STRATEGI DAN KONSEP

Strategi dan konsep pemberdayaan rakyat (baca: optimalisasi SDM) dalam menciptakan kekuatan mandiri tersebut haruslah mengandung muatan langkah-langkah kongkrit untuk meyakinkan masyarakat bagaimana mereka (baca: kita) agar tetap eksis dalam kehidupan yang serba materialistis ini dengan tidak menggantungkan hidup pada belas kasihan

orang lain. Pemahaman rakyat terhadap perilaku ekonomi yang berkeadilan adalah mutlak agar tercipta kedisiplinan sosial-ekonomi yang mengarah pada keyakinan diri sebagai dasar mencari jalan mengentaskan kemiskinan rakyat. Kemiskinan dalam perspektif sosial, menunjukkan ketidakmampuan masyarakat menggeser posisi kehidupannya, baik secara vertikal (naiknya taraf kehidupan sosial) maupun secara horisontal (bertambahnya akses individu dalam lingkungan yang lebih luas) yang disebabkan ketidakmampuan ekonomi.

Manusia dalam pembangunan ekonomi adalah subyek (pelaku) yang sekaligus obyek (penerima hasil) pembangunan. Sebagai subyek ia harus dilibatkan dan terlihat dalam proses pembangunan itu. Pemberdayaan berarti upaya apa yang perlu dilakukan agar rakyat dapat secara langsung didorong ke posisi "terlibat" dalam proses tersebut. Dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia, masalah pengangguran menimbulkan akibat yang serius, yaitu kemiskinan yang berlanjut sehingga akhirnya akan menciptakan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Masalah pengangguran pada hakekatnya bukanlah hanya bersangkutan dengan penyediaan lapangan kerja semata, melainkan berkaitan pula dengan faktor-faktor yang kompleks. Jika mengikuti alur pikir sistem, pada dimensi input, faktor nilai yang dianut, persepsi, motivasi dan kualitas manusianya serta hakekat sumberdaya alam, iptek yang digunakan merupakan faktor-faktor yang harus dapat diintegrasikan melalui dimensi proses secara benar. Manusia yang memiliki persepsi bahwa kerja adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja dan investasi orang lain, akan berhadapan

dengan kenyataan, tersedianya lapangan kerja dan tuntutan-tuntutan yang mengingrinya, ternyata tidak memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang yang memiliki persepsi seperti itu.

Kemiskinan dalam perspektif sosial-ekonomi menunjukkan ketidakmampuan masyarakat menggeser posisi kehidupannya baik secara vertikal (naiknya taraf kehidupan sosial) maupun secara horisontal (bertambahnya akses individu dalam lingkungan yang lebih luas) yang disebabkan ketidakmampuan ekonomi. perspektif ekonomi kontemporer, katakanlah melalui strategi pertumbuhan, ternyata masih menciptakan kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat, karena *trickle down effect* yang diharapkan terjadi berdasarkan strategi itu tidak seperti yang diharapkan. Konsep Neo Klasik ternyata lebih banyak mendorong proses ekonomi ke arah konsentrasi ekonomi yang semakin menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat dan melemahkan kekuatan ekonomi rakyat.

Untuk berfikir tentang bagaimana memberdayakan rakyat dilihat secara sosial dan ekonomi, untuk memperbaiki kemiskinan yang masih terjadi perlu diidentifikasi apa penyebab kemiskinan itu. Dilihat dari dimensi sosial kemiskinan salah satunya berakar dari cara berfikir dan lingkungan yang statis atau lingkungan ekonomi yang *concentrated* sehingga keinginan untuk merubah kondisi yang ada relatif tidak ada karena ketiadaan akses. Penyebabnya antara lain pendidikan yang rendah dan ketiadaan sumber-sumber daya ekonomi yang cukup (modal dan sumber daya alam). Dalam dimensi ekonomi kemiskinan itu disebabkan tiga pokok yaitu:

Berkurangnya kekayaan orang miskin dalam proses pembangunan ini antara lain karena tanah pertanian yang semakin

sempit akibat pembagian warisan atau dijual karena pembangunan pemukiman. Sedangkan harga penggantian sangat rendah dan terlalu sedikitnya hasil produksi yang bisa meraka jual.

Kemampuan berproduksi sangat terbatas dan sangat sulit melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan pada sektor industri kecil, lemahnya tehnis produksi dan sumber-sumber daya lain, menyebabkan rendahnya produk yang dapat ditawarkan.

Terlalu rendahnya harga jasa yang mereka terima karena rendahnya tingkat pendidikan, maka kualitas jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga harga jasa mereka rendah.

Dalam kaitan ini pemberdayaan ekonomi hanya mungkin kalau berbagai sub-sistem masyarakat, seperti yang telah disinggung dimuka, terbuka peluang untuk memperoleh *accessibility* sumber-sumber daya langka yang sama (*equal opportunity*), yang selama ini dinilai hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat. Salah satu cara yang sekarang ini digencarkan untuk mengatasi kesenjangan sosial yang disebabkan terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil masyarakat, adalah melalui strategi kemitraan. Tetapi strategi kemitraan ini haruslah dikembangkan dalam iklim demokrasi ekonomi yang mantap yang menjamin terjadinya dispersi kekuasaan ekonomi dalam masyarakat. persoalannya adalah, dalam bentuk apa kemitraan itu dapat diwujudkan sehingga mampu menyelesaikan kesenjangan ekonomi ?.

Aliansi diantara perusahaan besar di mana yang akan datang diramalkan semakin banyak terjadi, baik sesama perusahaan lokal maupun antara perusahaan lokal dan asing yang beroperasi di Indonesia, sejalan

dengan harapan peningkatan investasi asing langsung di tahun 1997. Fenomena akuisisi cukup mewarnai sektor bisnis Indonesia di tahun 1996 yang lalu, tetapi akuisisi akan cenderung selalu terjadi pada usaha skala besar dan usaha skala kecil agar perekonomian tidak semakin terkonsentrasi pada kekuatan perusahaan besar. Bila ingin mengatasi tantangan persaingan global di pasar domestik, penggalangan kekuatan ekonomi nasional melalui aliansi perusahaan besar dan kecil sangat berarti. Dalam kaitan ini tentu ada masalah-masalah. Fakta-fakta berikut menunjukkan hal ini:

Kepala Badan Pengembangan Industri Kecil (BAPIK) mengemukakan, dari 2,1 juta unit usaha industri kecil yang ada di Indonesia, sekitar 7% atau 175.000 unit diantaranya merupakan industri kecil formal. Dari jumlah itu, hanya 50.000 unit saja (35%) yang siap bermitra dan menunggu kerjasama *subcontracting* dengan usaha menengah besar (Bisnis Indonesia, 6 Januari 1997). Berita ini mengingatkan penulis pada sifat perekonomian kita yang selama ini cenderung tidak bersifat *take and give* diantara pelaku-pelaku ekonomi, terutama antara pelaku ekonomi skala besar dan pelaku ekonomi skala kecil di berbagai sektor bisnis. Kelompok bisnis kecil selalu menunggu uluran tangan kelompok bisnis skala besar. Ini menunjukkan ada masalah dalam kerjasama antara industri besar dan industri menengah-kecil. Industri kecil yang dapat melakukan pola *subcontracting* ini adalah industri yang sifat prosesnya memungkinkan kerjasama terkait dengan industri menengah besar *fill out product line*. Masih dalam kaitan data tersebut, beberapa jenis usaha kecil yang dapat melakukan kerjasama pola *subcontracting* antara lain: industri kecil pengerjaan logam dengan industri kendaraan bermotor,

industri konstruksi dan permesinan selain usaha kecil yang memproduksi komponen elektronika, garmen dan sebagainya.

Di sektor bisnis ritel muncul gema yang relatif sama. Ramlan Zoebir, dari kantor Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi, dalam seminar yang diselenggarakan oleh *Asean Productivity Organization* (Republika, 4 Januari 1997) mengemukakan perlunya aliansi diantara kelompok bisnis ritel besar dan kecil dalam negeri agar peluang pasar bebas lebih mungkin dimanfaatkan. Di Indonesia bisnis ritel berkembang pesat sehingga mencapai lebih kurang 150.000 unit. Pengusaha ritel yang termasuk kategori menengah kecil sekitar 85%, suatu jumlah yang cukup besar. Saat ini terlihat persaingan diantara kelompok bisnis ritel besar dan kecil dengan hasil kelompok ritel kecil selalu kalah. Supermarket ekonomi di pasar Beringharjo sebagai contoh, secara tidak langsung mendesak kelompok pengecer kecil. Di sektor pertanian terjadi pula kasus yang hampir sama. Ratusan petani buah-buahan serta perajin brem di Jawa Tengah mengeluh karena sebagian besar hasil panen mereka tidak lagi diterima PT Perindustrian Bapak Djenggot di Semarang dan Tangerang, karena perusahaan ini mulai membatasi jumlah produksinya (Kompas, 3 Januari 1997).

Data ini mengingatkan pada fenomena di sektor bisnis internasional tahun 1996 yang baru saja berlalu, antara lain aliansi diantara perusahaan besar seperti Boeing dan Mc Donnell dalam upaya meningkatkan skala ekonomi dan penguasaan pasar yang strategik. Pertanyaan yang muncul, mengapa perusahaan-perusahaan kecil seperti kelompok industri kecil tersebut sukar melakukan aliansi dengan perusahaan besar walaupun dalam bentuk *subcontracting* dan betapa mudahnya perusahaan besar

melakukan aliansi strategis seperti yang dilakukan oleh Boeing dengan kompetitor-nya Mc Donnell.

Aliansi dua perusahaan atau lebih merupakan salah satu cara strategik untuk menguasai pasar dalam iklim kompetisi yang semakin tajam. Apa yang dilakukan oleh PT. Ometraco Realty di sektor bisnis properti, yaitu beraliansi dengan grup Gajah Tunggal, merupakan salah satu cara mengatasi tantangan yang semakin meningkat di sektor bisnis properti. Andaikata kita gunakan saja kata kemitraan sebagai pengganti kata aliansi atau *subcontracting*, masalahnya adalah bagaimana kemitraan itu dapat dikembangkan antara perusahaan besar dan kecil, baik di sektor perdagangan maupun industri, sekaligus perusahaan besar berfungsi sebagai bapak angkat bagi perusahaan kecil. Masalah ini cukup penting untuk dikaji mengingat aliansi diantara perusahaan-perusahaan besar akan menjadikan kekuatan ekonomi Indonesia jangka panjang semakin terkonsentrasi, yang akhirnya akan menciptakan oligopoli.

Incubator bisnis yang tercipta sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan besar melalui penyisihan 2% keuntungan yang disyaratkan patut dihargai. Tetapi, kemitraan dalam keterkaitan operasional yang strategik tidak kalah penting, terutama dalam membuka jalur yang kuat pendanaan jangka panjang bagi mitra yang lebih kecil dan jaringan usaha. RAPBN 1996/1997 berupaya memperkecil ekspansi volume kredit. Ini berarti akses pendanaan (non-bank) bagi kelompok usaha menengah dan kecil melalui kemitraan dengan kelompok usaha besar akan semakin penting bagi perkembangan perekonomian yang akan datang.

Secara teoritik, motivasi aliansi atau kemitraan dipengaruhi oleh beberapa faktor

antara lain : akses nama atau *customers relationship*, mengembangkan skala ekonomi, mengisi kebutuhan produk pada lini yang sama, mengurangi besarnya investasi yang dibutuhkan dan memanfaatkan akses pasar yang strategik yang telah dimiliki oleh perusahaan yang akan menjadi mitra. Dalam kaitan dengan industri kecil seperti yang telah dikemukakan, alasan kemitraan (baca: *sub contracting*) baru pada satu faktor, yaitu mengisi kebutuhan produk pada lini yang sama. Untuk sektor pertanian berlaku juga alasan ini. Pada kedudukan ini *bargaining power* dari subkontraktor atau petani yang berfungsi sebagai *supplier* tetap lemah, karena pada umumnya perusahaan pada kelompok ini bersifat *fragmented* (banyak dan mudah dipermainkan).

Kemitraan yang diharapkan terjadi di berbagai sektor bisnis adalah berdasarkan kesamaan visi tentang arti penting kemitraan itu bagi perekonomian nasional. Visi itu haruslah mencerminkan nilai-nilai *silaturahmi* dan *take and give* (dalam kompetisi yang sehat) diantara kelompok-kelompok bisnis, khususnya perusahaan besar dan menengah kecil. Kendala yang dihadapi bagi kemitraan ini adalah, ketidaksamaan nilai komitmen, perbedaan kepentingan masing-masing partner, perbedaan prioritas jangka pendek dan jangka panjang, dan ketidaksamaan obsesi tentang sistem dan kultur masyarakat kita. Perbedaan ini akan dapat diperkecil jika perusahaan besar baik domestik maupun asing yang akan bermitra dengan kelompok usaha skala kecil memahami arti penting kebersamaan dalam proses perekonomian agar kesenjangan tidak semakin lebar dan tidak hanya terjadi kemitraan karena dorongan pemerintah. Sedangkan pada kelompok usaha kecil, harus juga menyadari bahwa kemitraan itu akan berhasil bila

kendala-kendala itu diatasi. Kultur pada usaha skala kecil yang cenderung berperilaku *establish* misalnya, tidak mungkin dihadapkan pada usaha skala besar yang cenderung menghendaki perubahan karena tuntutan persaingan pasar.

Tantangan perekonomian pada PELITA VII secara mikro adalah pasar domestik akan lebih diramaikan oleh persaingan yang lebih tajam diantara sesama pelaku bisnis, termasuk dengan pelaku bisnis asing. Oleh sebab itu, bila kelompok usaha kecil akan menggunakan strategi kemitraan sebagai cara strategik untuk mengatasi tantangan persaingan itu, para pelaku bisnis dalam kelompok ini perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan sumberdaya manusia pendukungnya dan memperhatikan berbagai problem dalam aliansi seperti yang telah dikemukakan. Aliansi atau kemitraan bukanlah sekedar kerjasama, melainkan harus mampu menciptakan sifat profesionalisme yang lebih tinggi dan jaringan usaha yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Konsep dasar kemitraan adalah meletakkan posisi pelaku ekonomi "kuat" dan "lemah" dalam proses *take and give* yang saling menguntungkan dan bertumpu paling tidak pada tiga konsep dasar, yaitu:

Konsep Kelembagaan

Konsep kelembagaan merupakan salah satu kekuatan masyarakat untuk membina lingkungan sosial yang kondusif bagi penanggulangan kemiskinan. Konsep ini merupakan faktor pendukung utama strategi pemberdayaan melalui kekuatan kelembagaan atau kekuatan organisasi sosial masyarakat yang tidak berdasarkan dominasi modal, melainkan berdasarkan atas asas *silaturahmi* atau kekeluargaan. Umat Islam sebagai contoh, melalui

generasi mudanya harus mampu bertindak melakukan kegiatan-kegiatan kongkrit yang melembaga seperti LSM, BPR Syariah dan BMT, agar sumberdaya ekonomi umat dapat digali dan dikembangkan. Nilai *silaturahmi* akan mewarnai kepedulian kelompok masyarakat yang lebih kuat terhadap kelompok masyarakat yang masih lemah (secara sosial dan ekonomi).

Konsep Take And Give

Konsep kebersamaan melandasi upaya masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Al Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda derajat, yaitu ada yang kuat dan ada yang lemah. Tetapi hakekat perbedaan itu adalah agar yang kuat dapat menggunakan yang lemah untuk tujuan yang sama-sama bermanfaat *take and give*. Oleh sebab itu strategi kemitraan *syirkah* merupakan strategi yang mendasar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Strategi Bapak Angkat dalam kegiatan ekonomi kurang tepat ditinjau dari segi prinsip-prinsip ekonomi Islam karena strategi ini lebih mencerminkan ketergantungan dan perlindungan yang dalam jangka panjang kurang mendorong dinamika proses menuju kemandirian. Al Qur'an mengajarkan, adanya sebagian golongan yang kuat dan sebagian golongan yang lemah untuk saling bekerjasama, dan bukan yang kuat mengeksploitasi golongan yang lemah.

Konsep Kerakyatan

Demokrasi ekonomi seperti yang tertuang dalam GBHN 1993 menjelaskan bahwa rakyatlah yang bertindak aktif (berproduksi) dan pemerintah menciptakan iklim untuk mereka agar bertindak aktif dalam ekonomi. Dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi rakyat bagian masyarakat yang lebih kuat secara ekono-

mis, kuat dalam posisi kelembagaan organisasi sosial dan politik tentunya dapat pula bertindak secara fungsional segaris dengan peran pemerintah untuk menciptakan iklim yang mendorong pemberdayaan umat agar mampu menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia untuk merubah nasib mereka. Dalam dimensi ini sangat diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang tidak hanya bisa menciptakan *trickle down effect* (menunggu tetesan) bagi rakyat kecil, tetapi sangat diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang melibatkan rakyat dalam menciptakan "tetesan" tersebut. Zakat harta merupakan salah satu bentuk kongkrit konsep *trickle down effect* yang bersifat langsung menurut perspektif ekonomi Islam. Pemberdayaan zakat dalam proses ini memerlukan manajemen yang strategik. Manajemen zakat yang profesional harus diupayakan sehingga zakat dapat berpotensi menjadi sumberdaya produktif yang *non-inflatoir*.

STRATEGI PEMBANGUNAN

Elemen kunci dalam proses pembangunan ekonomi adalah partisipasi utama rakyat dalam membawa perubahan struktural perekonomian. Bagaimana partisipasi ini dapat digerakkan, tergantung pendekatan pembangunan apa yang dijalankan. Pendekatan pertumbuhan tinggi dengan harapan terjadinya proses *trickle down effect* ternyata telah gagal menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui dukungan faktor-faktor yang bersifat endogen (motivasi, ketrampilan, daya juang dan sebagainya) serta dalam proses pendistribusian sumber-sumber daya ekonomi.

Oleh sebab itu, kemitraan barangkali dapat dipakai sebagai cara pendistribusian kekayaan atau sumber daya langka antara para pengusaha kuat dan pengusaha lemah

dan antara golongan kaya dan masyarakat yang tergolong miskin. Tetapi konsep kemitraan itu haruslah dalam konteks strategi jangka panjang dan bukan langkah praktis jangka pendek. Kemitraan harus menjadi suatu sistem kemitraan selain koperasi. Bentuk apa yang dapat diwujudkan dalam kemitraan itu tergantung strategi pembangunan yang dijalankan. Strategi pembangunan ekonomi kita saat ini lebih tepat dikatakan sebagai strategi *Growth with Distribution*. Dalam konteks strategi ini beberapa pendekatan dapat dipakai.

Irma Adelman (1987), mengungkapkan cara pendekatan pemberantasan kemiskinan yang berorientasi pada produktivitas untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Cara ini bertujuan meningkatkan pendapatan kaum miskin dengan meningkatkan produktivitas mereka sekaligus meningkatkan kemampuan memperoleh barang-barang yang memperbesar produktivitas mereka. Irma Adelman tidak menganjurkan cara pendekatan yang berorientasi pada pengalihan kekayaan (bantuan yang diberikan secara langsung). Cara pendekatan terhadap kebijaksanaan yang terpusat pada perekonomian rakyat kecil berupaya untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut: (1) meningkatkan jumlah milik yang dimiliki kaum miskin; (2) meningkatkan volume penjualan produk mereka di pasaran; (3) meningkatkan harga jasa yang mereka jual.

Untuk sasaran meningkatkan jumlah milik yang dimiliki kaum miskin pandangan dari Hollis Chenery patut dipertimbangkan, yaitu: jika kita ingin membantu akumulasi milik kaum miskin maka program-program investasi dalam fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan tata guna tanah kaum miskin atau investasi-investasi dalam program kredit dan subsidi bagi petani miskin perlu

dilakukan. Pada aspek yang kedua, yaitu pasaran, maka kemitraan antara pengusaha kuat dengan pengusaha kecil bagi produk dalam lini yang relevan antara sektor pertanian dan sektor manufaktur sangat diperlukan. Pada aspek yang ketiga, yaitu, meningkatkan harga jasa yang mereka jual maka kebijaksanaan menaikkan harga dapat beroperasi melalui pasaran komoditi yang dapat menaikkan harga barang-barang yang dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja kaum miskin. dalam konteks ini produk sektor industri kecil yang padat karya misalnya, dalam lini yang sama secara nasional berdasarkan asas kemitraan semestinya menjadi tanggung jawab pengusaha kuat (eksportir) dalam pemasaran internasional.

Langkah selanjutnya adalah bentuk kelembagaan apa yang diperlukan untuk mendukung kemitraan itu?. Kelembagaan kelompok dalam suatu sektor industri dalam bentuk *business cycle* yang kuat mulai dari industri hulu sampai ke industri hilir telah menimbulkan konsentrasi ekonomi yang mengarah dari oligopoli ke monopoli. Keadaan ini harus dicegah dengan cara antara lain membentuk kelembagaan kerjasama yang bersifat lini antara pengusaha yang kuat dan pengusaha yang lemah. Lemah dalam arti kurang modal, lemah dalam pemasaran dan manajemen.

Lembaga keuangan yang spesifik yang menyatukan dana-dana dari konglomerat bagi perekonomian rakyat kecil diperlukan

meningkatkan volume penjualan produk di untuk mendukung kemandirian usaha dalam konteks kemitraan itu. Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) salah satu tujuan juga adalah untuk kemandirian usaha bagi rakyat miskin di perdesaan. Bantuan IDT bukanlah bentuk bantuan yang pasif. IDT juga termasuk suatu program yang dapat meningkatkan harta milik kaum miskin melalui peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan. Melalui lembaga keuangan spesifik itu pula para konglomerat akan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat desa, yang akhirnya dapat meningkatkan jumlah harta milik mereka sebagai salah satu ciri meningkatkan kehidupan masyarakat miskin.

Saat ini terdapat tiga bentuk program yang akan dilembagakan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, yaitu: Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) yang digerakkan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN (bersifat non-IDT), lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penjamin kredit yang ditangani oleh KADIN (realisasi Jimbaran), dan program kemitraan lainnya. Program seperti itu dan program yang lainnya yang mungkin terbentuk harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat miskin itu sendiri dan memerlukan sistem pengendalian yang *integrated* untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Etzioni, (1988), *The Moral Dimension Toward A New Economics*, The Free Press A Division of Macmillan Inc.
- Gemmell Norman (Ed), (1992), *Tentang Colman dan Nixon Dalam: Ilmu Pembangunan*, LP3ES.

Gillis, Malcom, (1987), *Economic Development*, Second Edition, W.W. Norton Company.

Mubyarto, (1987), *Ekonomi Pancasila*, LP3ES.

Partadiredja, Ace, (1981), *Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM*.

Swasono, Sri Edi (Ed), (1987), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta, UII-Press.

Syahrir (Ed), (1989), *Menuju Masyarakat Adil Makmur*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia.